

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai strategi pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam mengelola potensi pariwisata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi titik fokusnya adalah mengenai pengelolaan potensi pariwisata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias Barat.

Tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya manusia yang ada. Maka dari itu, perlu adanya revolusi mental yang berawal sering bergantung menjadi insan yang mandiri yang memberikan manfaat bagi insan yang lainnya sehingga akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar serta mampu berpikir kreatif dalam mengembangkan usaha yang ada. Misalnya, dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam yang secara profesionalis dimana sektor pariwisata dengan berbagai tempat membutuhkan penyempurnaan infrastruktur dan penambahan fasilitas wisatawan sehingga akan menarik perhatian para pengunjung baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca Negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam.

Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan

kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata juga tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation).

a. perencanaan pariwisata

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu:

1. perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata,
2. perencanaan penggunaan lahan,
3. perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain,
4. perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial,
5. perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

b. pembanguna pariwisata

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

c. Kebijakan Pariwisata

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

d. Peraturan Pariwisata

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.

Dengan adanya berbagai kebijakan yang mendukung dunia kepariwisataan, maka tentunya akan memberikan peluang yang sangat besar untuk mengembangkan dunia kepariwisataan di Indonesia, khususnya bagi daerah yang memiliki sejumlah potensi wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut.

Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah. Dengan adanya UU tersebut pemerintah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan obyek wisata.

Peningkatan pada sektor kepariwisataan juga mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, antara lain lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan penerimaan devisa negara dapat meningkat melalui upaya pengembangan berbagai potensi kepariwisataan nasional. Pembangunan di bidang kepariwisataan merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Setiap daerah memiliki potensi wisata yang berbeda-beda, tergantung bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat membangun potensi tersebut menjadi destinasi wisata yang menarik dan mengundang banyak wisatawan yang berkunjung

Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perencanaan pengembangan dapat dimulai dengan mengenali wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pengembangan kepariwisataan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya serta penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan juga menjadi hal yang perlu dilakukan serta perlu pula dilengkapi dengan kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang jasa kepariwisataan.

Sejalan dengan hal di atas, dalam ketetapan MPR No. IV. Tahun 1999 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menetapkan bahwa: Pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisiplin dan partisipator dengan menggunakan kriteria ekonomis, tekhnis, agronomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Jadi pengembangan pariwisata pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan lahir maupun batin bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kekayaan wilayah nusantara sebagai modal dan landasan pengembangan budaya bangsa secara keseluruhan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kepariwisataan merupakan salah satu komoditi ekspor non migas yang cukup potensial, yang mampu mendatangkan devisa yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu konsentrasi penuh dari pemerintah pusat, guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah, terutama didaerah yang memiliki potensi pariwisata, sehingga dapat dikelola semaksimal mungkin. Dengan demikian, sektor kepariwisataan merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah terutama dalam rangka menunjang

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Untuk merealisasikan semua itu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang kepariwisataan, seperti yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 1999 yang menyebutkan bahwa : Menjadikan kesenian dan kebudayaan nasional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antara bangsa

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Resky Sirupang Kanuna pada tahun (2014). “bahwa penelitian yang dilakukan berangkat dari masalah yakni bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam dan Berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi wisata alam dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi objek wisata terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah (dinas kebudayaan dan pariwisata) dalam mengelola sektor pariwisata adalah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Toraja Utara, melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Jenis pariwisata yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah objek wisata budaya.¹

Penelitian yang dilakukan Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga pada tahun 2016 “ penelitian yang dilakukan berangkat dari masalah, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata alam dan wisata budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata alam dan wisata budaya di Kabupaten Tapanuli Utara.” Hasil penelitian peran pariwisata dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana dan prasarana obyek dan sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara.²

Menurut Riant Nugroho, strategi tak lain tak bukan adalah cara mencapai tujuan. Tetapi ada lima dimensi yang harus tercakup di dalamnya untuk dapat menjadi strategi yang benar (efesien, efektif) dan baik (dapat diterima sebagai produk manusia yang manusiawi) yaitu,

- Ilmiah, sehingga harus metodologis

¹ Resky Sirupang Kanuna, *Skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara (Studi kasus Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara)”*. Ilmu Pemerintahan Daerah, Universitas hasanuddin, Makasar. Hal. 1

² Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial Politik UMA “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam Dan Budaya Di Kabupaten Tapanuli Utara (Studi kasus Kabupaten Tapanuli Utara)”* Ilmu Pemerintahan, Universitas Medan Area, Indonesia. Hal. 1

- Rasional, sehingga harus sistematis
- Pragmatis, sehingga harus dapat dimanajemeni
- Politis, sehingga mempertimbangkan konstelasi kekuasaan
- Etis, sehingga mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan, kepatuhan, moralitas, dan kemanusiaan.³

Menurut Dye (1978), kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do or not to do.”, Yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda.⁴

potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (Majdi 2007)⁵

Begitu juga dengan Kabupaten Nias Barat yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang berada dalam satu pulau dengan Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli yang disebut dengan Pulau Nias. Kabupaten Nias Barat berada di sebelah barat Pulau Nias yang berjarak \pm 60 km dari Kota Gunungsitoli yang disahkan sebagai daerah otonomi baru (DOB) pada tahun 2008 yang terdiri dari 8 kecamatan dan 105 desa. Kabupaten Nias Barat ini memiliki potensi kawasan pariwisata yang baik meliputi beach, island, dan culture serta dikenal dengan produksi unggulan daerah diantaranya sebagai penghasil kopra, kelapa, karet, kakao, nilam, padi, dan peternakan babi.

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

³ Riant Nugroho, *perencanaan Strategis In Action*, Bandung : Elex Media Kumputindo, 2010, hal 21

⁴ <https://afrizalwszaini.wordpress.com/2012/01/13/definisi-kebijakan-publik-menurut-pakar/> Diakses tanggal 17 Mei 2018

⁵ <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-potensi-menurut-para-ahli/> Diakses tanggal 29 April 2018

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah, yang dimaksud ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, dan dukungan terhadap usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Selain produksi unggulan di darat, tidak kalah penting dengan hasil-hasil laut seperti potensi perikanan dan rumput laut yang mengelilingi pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Kecamatan Sirombu, yaitu : pulau Si'ite, pulau Imana, pulau Langu, pulau Heruanga, pulau Hinako, pulau Asu, pulau Begi, pulau fari'i, pulau Hamutala, pulau Lawandra, dan pulau Bawa. Kondisi alam disekitar pulau-pulau tersebut sangat eksotis karna masih asri dan belum tersentuh oleh perkembangan teknologi. Kesebelas pulau tersebut sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai tujuan wisata nasional bahkan kelas dunia, ditambah dengan Rumah Adat Nias Barat di desa Sitelubanua dan situs megalitikum di Lahomi, desa Lolozirugi, dan desa Sisarahili, serta berbagai kultur budaya yang unik dan menarik.

Meskipun daerah otonomi baru, pemerintah Kabupaten Nias Barat juga melakukan berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan potensi yang ada di Kabupaten Nias Barat salah satunya yaitu, melaksanakan kegiatan pemilihan Duta Wisata Nias Barat, berdasarkan atas Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang disponsori oleh Pemda Nias Barat melalui Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat, yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan pelaksanaan pemilihan Putri Pariwisata Kabupaten Nias Barat yang dimulai pada tahun 2016. Melalui kegiatan putra-putri ini, maka akan memberikan kontribusi bagi daerah Kabupaten Nias Barat dalam mempromosikan kekayaan seni, budaya dan pariwisata yang ada di Nias Barat, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia khususnya generasi muda menjadi insan pariwisata yang berkualitas dan handal untuk menunjang keberhasilan promosi

pariwisata Nias Barat. Sehingga duta wisata yang terpilih nantinya akan dikirim ke tingkat provinsi dan dapat mempromosikan pariwisata Nias Barat sesuai dengan kemampuannya, keramahan yang ditampilkan dan penguasaan untuk mempromosikan objek-objek wisata di Kabupaten Nias Barat. Upaya lain yang dilakukan adalah pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB) Nias Barat, antara Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Barat dengan Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata ITB Bandung, yang baru dibentuk pada tahun 2017. Dimana hal ini merupakan acuan dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Nias Barat.

Pada tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Nias barat

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Nias Barat

Tahun 2015-2017

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Asing	Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	100	500	600
2016	175	650	825
2017	250	775	1025

Sumber : *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat, 2015-2017*

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Nias Barat sampai pada tahun terakhir mengalami peningkatan.

Dalam hal ini Nias Barat pada khususnya sangat potensial alam rayanya. Menurut Sekda Kabupaten Nias Barat, potensi wisata di Nias Barat bila dieksplorasi akan sangat banyak hal yang dapat menjanjikan untuk menjadi sumber pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Kabupaten Nias Barat memiliki potensi yang besar, namun sebagian

besar belum tergarap dengan maksimal. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Kabupaten Nias Barat dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata diberbagai objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat, serta dapat dilihat dari keadaan penduduk, dimana pada kenyataannya masyarakat Nias Barat masih sangat perlu diperhatikan, disana-sini masih merajalela kontradiksi kemiskinan. Kepala Badan pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Wien Kusdiatmono, mengatakan penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 2014 mencapai 1.360.600 orang atau 9,85 % dari total penduduk Provinsi tersebut.

Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Nias semuanya memiliki penduduk miskin dengan persentase besar, sementara Nias Barat tepat pada posisi kedua setelah Nias Utara, sebesar 28,10%. Padahal Nias memiliki sumber daya alam yang tidak ternilai harganya jika dikelola dan dikembangkan kelestariannya. Karena pada hakikatnya mayoritas pendapatan masyarakatnya berasal dari hasil pertanian, perkebunan, nelayan maupun jenis pengelolaan alam lainnya, yang bisa dikelola dan dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan menjadikan Kabupaten Nias Barat sebagai tempat wisata yang menarik perhatian wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Dimana dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional maka dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Nias Barat melakukan pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis masyarakat, serta memberikan perlindungan kelestarian sumber hayati kepariwisataan. Sehingga tujuan pembangunan dapat menciptakan lapangan kerja produktifitas serta mempertahankan sumber daya alam dan lingkup wilayah Kabupaten Nias Barat.

Maka, berdasarkan pemahaman peneliti lebih tepatnya melakukan penelitian tentang pengelolaan potensi pariwisata. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian

dengan judul “**Strategi Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam mengelola potensi pariwisata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam mengelola potensi pariwisata di Kabupaten Nias Barat
2. Berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias Barat
3. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Nias Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam mengelola potensi pariwisata di Kabupaten Nias Barat
2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias Barat
3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Nias Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen dapat memperkaya bahan referensi penelitian di bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Terkhusus bagi program studi Ilmu Administrasi Negara dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi penulis berguna sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologi serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap gejala dan permasalahan di lapangan. Penelitian ini untuk memberikan gambaran secara obyektif kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Nias Barat.

BAB II

KERANGKA TEORI

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah menjabarkan kerangka teori atau landasan teori yang terkait dalam penelitian ini. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁶

Secara umum teori adalah konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui, jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori.⁷ Adanya landasan teoritis merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.⁸

Berdasarkan definisi dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa landasan teori atau kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroiti atau memecahkan masalah. Pedoman teoritis yang membantu memuat pokok-pokok pikiran dalam menggambarkan dari sudut pandang mana tersebut disoroiti.

2.1. Pariwisata

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 52

⁷ *Ibid*, hal. 53

⁸ *Ibid*, hal. 52

2.1.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata secara etimologis dikatakan kata *tour* berasal dari bahasa latin yaitu *tornare* dan dalam bahasa yunani yaitu *tormos* yang berarti *lathe or circle* maksudnya adalah perpindahan dari suatu titik pusat. Sedangkan *isme* berarti tindakan. *Tour* dan *isme* digabungkan menjadi *tourism* yang berarti perpindahan atau perputaran dari satu titik dan kembali dari titik semula. Sehingga *tour* menunjukkan suatu perjalanan yang berputar (*round trip*).⁹

Mathieson and Wall menyebutkan bahwa pariwisata adalah perpindahan masyarakat untuk sementara ke suatu destinasi di luar tempat normal mereka tinggal dan bekerja untuk melakukan aktivitas di daerah destinasi dengan adanya fasilitas untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Selain itu, pariwisata juga dapat didefinisikan berdasarkan bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata *pari* dan kata *wisata*. *Pari* yang artinya penuh dan *wisata* berarti perjalanan, sehingga pengertian secara harafiah pariwisata diartikan “penuh dengan perjalanan”

Pariwisata juga dapat memberikan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peningkatan devisa, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, mempererat persahabatan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pengembangan, pemasaran, dan pemberdayaan produk nasional melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

⁹ | Gusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi, *Metode Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, Yogyakarta : Andi, 2012, hal. 103

¹⁰ *Ibid*, hal. 104

Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial dan belum dapat dikatakan sebagai daya tarik wisata. Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.

Jadi menurut pemahaman peneliti dapat disimpulkan bahwa Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan dan dapat memberikan kontribusi besar bagi suatu daerah atau Negara.

2.1.2. Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan dimiliki oleh setiap tempat wisata. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut.

Potensi wisata dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Potensi Wisata Alam

Yang dimaksud dengan potensi wisata alam adalah keadaan, jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam seperti pantai, hutan, pegunungan dan lain-lain (keadaan fisik suatu daerah)

2. Potensi Wisata Kebudayaan

Yang dimaksud dengan potensi wisata kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan sejarah berupa bangunan (contoh monumen).

3. Potensi Wisata Buatan manusia

Potensi wisata manusia juga sebagai daya tarik wisata berupa, pementasan tarian, pementasan atau pertunjukan seni budaya suatu daerah.

2.1.3. Pengembangan Pariwisata

Menurut Paturusi (2001) dalam Suwanto mengungkapkan bahwa pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah. Strategi pengembangan kepariwisataan bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahap.¹¹

Murphy (1983) dalam Yoeti mengatakan bahwa perencanaan dan pembangunan pariwisata adalah untuk memperoleh dampak positif bagi perkembangan ekonomi (dari segi pemerintah) dan perdagangan pada suatu daerah tujuan wisata bagi pengusaha.¹²

Pengembangan pariwisata juga hendaknya merumuskan misi. Dalam arti berisi suatu pernyataan mengenai pandangan filosofis dan tujuan. Perumusan misi harus didasarkan pada kompetensi daerah dan hendaknya memenuhi syarat kelayakan, dapat memberi semangat, bersifat khusus, berbeda dengan yang lain. Misalnya, kalau potensi pariwisata itu yang dominan adalah warisan budaya yang dimiliki daerah, maka misi harus mendapat penekanan utama pada warisan budaya itu.¹³

Selama ini dapat dikatakan suatu daerah tujuan wisata belum lagi merumuskan misinya secara tepat, namun sebaliknya diketahui bahwa dalam perencanaan pengembangan pariwisata di daerah , justru misi itu belum sempat dirumuskan sama sekali. Dari misi yang pernah

¹¹ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi, 2004, hal.55

¹² Oka A. Yoeti, *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan wisata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005, hal. 52

¹³ *Ibid*, hal. 47

dirumuskan, pada umumnya tidak sejalan dengan sasaran atau tujuan yang sudah disepakati bersama.

Suatu pernyataan misi yang pernah dirumuskan oleh *The West Country of England (English Tourist Board 1980)* yaitu :

1. Mengembangkan pariwisata untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari kegiatan pariwisata yang dikembangkan.
2. Mendorong peningkatan kinerja pariwisata sebagai suatu industri untuk meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pariwisata dapat mendorong konservasi alam di daerah dimana pariwisata itu dikembangkan.
3. Mendorong terciptanya suatu keseimbangan antara peningkatan pariwisata dengan kemampuan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya di daerah tersebut.¹⁴

Mill and Morrison (1985) dalam Yoeti juga menganjurkan supaya sasaran sektor pariwisata tidak ditetapkan secara eksklusif, karena sasaran pariwisata harus disusun sesuai dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Rencana untuk pembangunan *Snowdonia National Park di North Wales* mencoba mengintegrasikan pariwisata dan perekonomian plus sosial masyarakat setempat dengan rumusan sebagai berikut :

1. Memelihara pola pertanian tradisional
2. Mendorong dan mengusahakan agar hasil kegiatan pariwisata dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal semaksimal mungkin.
3. Memelihara dan menjaga identitas lokal tidak hilang dan mencegah terjadinya kerusakan warisan budaya yang dimiliki daerah.¹⁵

Suatu obyek wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, menurut Maryani (1991) dalam artikel Lisa Herdiana syarat-syarat tersebut adalah :

1. *What to see*, di tempat tersebut harus ada obyek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan "*entertainment*" bagi wisatawan, yang meliputi pemandangan alam, kegiatan kesenian, dan atraksi wisata.
2. *What to do*, di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat itu.
3. *What to buy*, tempat tujuan wisata harus menyediakan fasilitas untuk berbelanja terutama barang *souvenir* dan kerajinan rakyat sebagai cinderamata untuk dibawa pulang.

¹⁴ *Ibid*, hal. 49

¹⁵ *Ibid*, hal. 52

4. *What to arrived*, di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi obyek wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan, dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut.
5. *What to stay*, bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur di obyek wisata itu. Diperlukan penginapan-penginapan.¹⁶

Menurut IUOTO (*International Union Of Official Travel Organization*) dalam I Gusti pariwisata seharusnya dikembangkan oleh setiap Negara karena delapan alasan utama, yaitu :

1. Pariwisata sebagai faktor pemicu perkembangan ekonomi nasional maupun international.
2. Pariwisata merupakan pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, dan jasa-jasa pelayanan lainnya.
3. Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi.
4. Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi.
5. Penghasil devisa.
6. Pemicu perdagangan international.
7. Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa *hospitality* yang andal dan santun.
8. Pangsa pasar bagi produk lokal, sehingga aneka ragam produk terus berkembang seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.¹⁷

2.1.4. Komponen Pariwisata

Pariwisata terdiri dari lima komponen besar, dimana komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang memerlukan keterkaitan, ketergantungan dan keterpaduan yaitu :

1. Atraksi wisata yaitu daya tarik wisatawan seperti sumber daya manusia, budaya, adat istiadat dan sebagainya.
2. Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian yang terpenting.

¹⁶ <http://lisaherdiana.blogspot.co.id/2012/04/daya-tarik-dan-kawasan-wisata.html?m=1> Diakses tanggal 18 Mei 2018

¹⁷ I Gusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi, *Op.Cit*, hal. 95

3. Pasar (Asal Wisatawan) merupakan bentuk analisis mendalam tentang trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan lain-lain yang menyangkut wisatawan.
4. Transportasi merupakan suatu yang menyangkut orang dan destinasi pariwisata.
5. Fasilitas atau pelayanan merupakan pendukung aktivitas pariwisata yang didominasi pihak swasta.

2.1.5. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata (*tourism marketing*) adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan termasuk dalam kelompok industri pariwisata untuk melakukan identifikasi terhadap wisatawan yang sudah punya keinginan untuk melakukan perjalanan wisata dan wisatawan yang punya potensi akan melakukan perjalanan wisata dengan jalan melakukan komunikasi dengan mereka, mempengaruhi keinginan, kebutuhan, memotivasinya terhadap apa yang disukai dan yang tidak disukainya, pada tingkat daerah-daerah lokal, regional, nasional ataupun internasional dengan menyediakan obyek dan atraksi wisata agar wisatawan memperoleh kepuasan optimal. Pemasaran pariwisata mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Menemukan apa yang menjadi keinginan konsumen (*market research*)
2. Mengembangkan pemberian pelayanan yang sesuai kepada wisatawan (*product planning*)
3. Pemberitahuan tentang produk yang dibuat (*advertising and promotion*)
4. Dan memberikan instruksi dimana suatu produk dapat diperoleh (*channels of distribution-tour operator and travel agent*).¹⁸

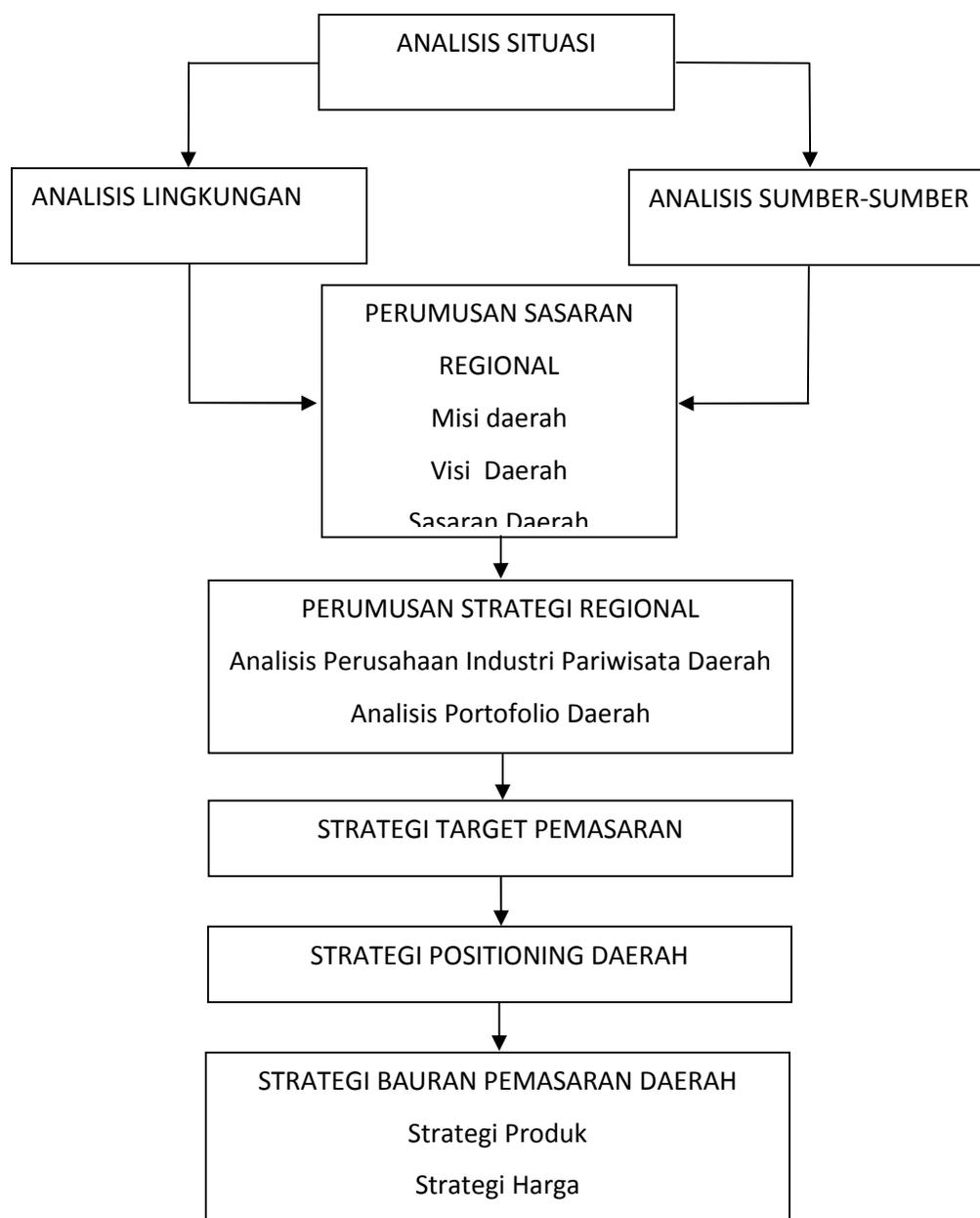
Untuk memasarkan produk industri pariwisata bukan saja diperlukan koordinasi, tetapi diperlukan kerjasama yang baik antara organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata dengan semua pihak yang terlibat dan berkaitan dengan kegiatan pariwisata.

Keberhasilan suatu program pemasaran dalam bidang kepariwisataan sangat ditentukan oleh faktor kesamaan pandangan terhadap peranan pariwisata bagi pembangunan daerah, karena itu sebelum program pemasaran dilaksanakan harus ada komitmen dari semua unsur terkait

¹⁸ Happy Marpaung, *Pengetahuan Kepariwisataan*, Bandung: Alfabeta, 2000, hal. 65

bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang bersifat *quick yielding* dan merupakan *agent of development* bagi daerah itu.

Gambar 2.1 Kerangka Perencanaan Strategis Pemasaran Pariwisata Daerah





Sumber: *perencanaan strategis pemasaran daerah tujuan wisata, 2005 hal 28*

2.1.6. Pelaku pariwisata

Pelaku pariwisata merupakan semua pihak yang berperan dan ikut terlibat dalam kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku-pelaku pariwisata sebagai berikut :

1. Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk atau layanan wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya) yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan tersebut, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.
2. Industri pariwisata/penyedia jasa adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dapat digolongkan dalam dua golongan utama yaitu:
 - a. Pelaku langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau jasanya langsung di butuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan dan lain-lain.

- b. Pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembaran panduan wisata dan sebagainya.
3. Pendukung wisata adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi sering kali tergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk didalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM dan sebagainya.
4. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan sebagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain dalam memainkan peran masing-masing.
5. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang tinggal dikawasan wisata. Mereka merupakan salah satu aktor penting dalam pariwisata karena sesungguhnya mereka yang menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi dan dikonsumsi oleh wisatawan. Air, tanah, dan hutan merupakan sumber daya yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada ditangan mereka.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi non-pemerintah yang sering melakukan aktifitas kemasyarakatan diberbagai bidang, termasuk dibidang pariwisata, seperti WWF untuk perlindungan Orang Utan dikawasan Bahorok Sumatera Utara atau di Tanjung Putting Kalimantan Selatan, Kelompok Pecinta Alam dan lain-lain.

2.1.7. Objek Wisata

Objek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (*something to see*). Di luar negeri objek wisata disebut *tourist attraction* (atraksi wisata), sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata.

1. Objek Wisata Alam

a. Pantai

Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Pantai merupakan salah satu objek dan daya tarik wisata yang berkaitan erat dengan aktivitas seperti berjemur diterik matahari, berenang, naik perahu, berfoto dan lain-lain.

b. Pegunungan

Pegunungan merupakan salah satu tempat tujuan dari para wisatawan dengan tujuan untuk menikmati pemandangan, mendaki, berkemah ataupun berfoto. Jenis objek wisata ini termasuk gunung berapi dan bukit-bukit dengan keunikan tertentu.

c. Tanah dan Daerah Konservasi merupakan tempat atau lokasi yang berhubungan dengan flora dan fauna misalnya taman safari, kebun binatang, aquarium dan lain-lain.

2. Objek Wisata Sosial Budaya

a. Museum merupakan suatu tempat yang berhubungan dengan aspek alam dan aspek kebudayaan disuatu kawasan atau daerah tertentu. Museum ini berupa arkeologi, sejarah, teknologi, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

- b. Peninggalan sejarah purbakala dan monument nasional, gedung sejarah, kota, desa, bangunan dan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lain seperti bangunan-bangunan kunci.
- c. Wisata keagamaan, etnis dan nostalgia, erat kaitannya dengan wisatawan atau pengunjung yang memiliki latar belakang kebudayaan, agama, etnis, dan sejarah yang sama atau hal-hal yang pernah berhubungan dengan masa lalunya.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek wisata yang baik dan menarik untuk dikunjungi harus mempunyai keindahan alam dan juga harus memiliki keunikan dan daya tarik untuk dikunjungi serta didukung oleh fasilitas pada saat menikmatinya. Sehingga setiap pengunjung yang datang dapat betah tinggal di daerah wisata tersebut.

2.1.8. Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Daerah

Pendit Nyoman menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berperan dalam industri daerah adalah:

1. **Kualitas Sumber Daya Manusia**
Salah satu kunci sukses pariwisata di Indonesia adalah *human resources development* diberbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah.
2. **Promosi Kepariwisata**
Upaya-upaya pengenalan potensi budaya dan alam di daerah yang ada di Indonesia dilakukan dengan promosi kepariwisataan. Pada abad 21, dimana perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat maka diperkirakan akan terjadi persaingan di pasar global khususnya persaingan di bidang industri pariwisata. Oleh karenanya promosi kepariwisataan merupakan suatu strategi yang harus dilakukan secara berkesinambungan baik di tingkat internasional maupun regional.
3. **Sarana dan Prasarana Kepariwisata**
Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana

dan prasarana kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan industri pariwisata daerah.¹⁹

Ketiga faktor tersebut merupakan faktor kritis yang perlu mendapat perhatian serius dalam rangka pengembangan industri pariwisata daerah. Tujuan pengembangan industri pariwisata daerah dapat tercapai apabila ketiga faktor tersebut dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Hanya saja perlu disadari bahwa pengembangan pariwisata sebagai industri memerlukan biaya yang tidak sedikit.

2.2. Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* (stratus artinya militer, danag artinya pemimpin), yang dapat diartikan sebagai seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi militer didasarkan pada pemahaman akan kekuatan dan penempatan posisi lawan, karakteristik fisik medan perang, kekuatan dan karakter sumber daya yang tersedia, sikap orang-orang yang menempati teritorial tertentu, serta antisipasi terhadap setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Menurut Chandler dalam Husein Umar, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas

¹⁹ Pendi Nyoman S, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*, Jakarta :Pradnya Paramita, 2002, hal. 30

alokasi sumber daya.²⁰ Sedangkan menurut Porter dalam Freddy Rangkuti, strategi adalah alat-alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.²¹ Menurut Michael Allison dan Jude Kaye, Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi: strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.²²

Riant Nugroho juga mendefinisikan strategi tak lain tak bukan, adalah cara mencapai tujuan. Tetapi ada lima dimensi yang harus tercakup di dalamnya untuk dapat menjadi strategi yang benar (efisien, efektif) dan baik (dapat diterima sebagai produk manusia yang manusiawi) yaitu,

- Ilmiah, sehingga harus metodologis
- Rasional, sehingga harus sistematis
- Pragmatis, sehingga harus dapat dimanajementi, yang berarti juga ada faktor “teknis” dan “seni” di dalamnya
- Politis, sehingga mempertimbangkan konstelasi kekuasaan
- Etis, sehingga mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan, kepatuhan, moralitas, dan kemanusiaan.²³

Selain itu juga definisi yang lebih luas khusus, misalnya dua pakar strategi Hamel dan Prahalad, yang mengangkat kompetensi inti sebagai hal penting. Mereka berdua mendefinisikan strategi yang terjemahannya sebagai berikut. Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.²⁴ Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan

²⁰ Husein Umar, *Disein Penelitian Manajemen Strategik : Cara Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik Bisnis*, Ed. Ke-1, Jakarta : Rajawali Perss, 2010, hal. 16.

²¹ Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOTT*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal. 4.

²² Michael Allison dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis Bagi organisasi Nirlaba*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004, hal. 3

²³ Riant Nugroho, **Op.Cit**, hal 21

²⁴ Freddy Rangkuti, **Op.Cit**, hal 4

konvetensi inti (*core compentencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi ini di dalam bisnis yang dilakukan.

Konsep strategi militer seringkali diadaptasi dan ditetapkan dalam dunia bisnis, misalnya konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl Von Clausewitz. Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi (Jain, 1990):

1. Sumber daya yang dimiliki terbatas
2. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi
3. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi
4. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu
5. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.²⁵

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu (1) dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intens to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Maka yang terkandung dari strategi ini adalah para manager memainkan peran aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi.

Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manager yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.²⁶

Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana tentang upaya yang akan dijalankan oleh sebuah organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan tersebut yakni mendapatkan keuntungan serta menghadapi lingkungan bisnis yang selalu berubah.

²⁵ <http://respublikcaetetera.blogspot.com/2016/03/strategi-bisnis.html?m=1> Diakses tanggal 20 Mei 2018

²⁶ <https://www.wattpad.com/943685-analisis-strategi-bisnis/page/3> Diakses tanggal 28 Mei 2018

2.2.1. Ciri Strategi

Sebuah strategi menciptakan arah yang diunifikasi untuk organisasi yang bersangkutan sehubungan dengan macam-macam sasaran dan ia mengarahkan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan organisasi yang bersangkutan menuju ke arah sasaran-sasaran tersebut.

Robert H. Hays dan Steven C. Wheelwright dalam Winardi telah mengidentifikasi lima macam ciri utama strategi sebagai berikut:

1. **Ufuk Waktu (Time Horizon)**
Istilah strategi digunakan untuk menerangkan aktivitas-aktivitas yang mencakup sebuah ufuk waktu yang diperluas, dengan memperhatikan baik waktu yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas demikian dan waktu yang diperlukan guna mengobservasi dampaknya.
2. **Dampak (Impact)**
Sekalipun konsekuensi-konsekuensi mengikuti strategi tertentu akan menjadi jelas untuk jangka lama, dampaknya penting.
3. **Pemusatan Upaya (Concentration of effort)**
Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan aktivitas, upaya atau perhatian terhadap sejumlah tujuan yang relatif sempit. Upaya memusatkan perhatian atas aktivitas terpilih tersebut secara implicit mengurangi sumber daya yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. **Pola keputusan-keputusan(The Pattern of Decisions)**
Kebanyakan strategi mengharuskan diambilnya suatu seri jenis-jenis keputusan tertentu, dengan berlangsungnya waktu. Keputusan tersebut harus saling membantu dalam arti bahwa mereka mengikuti pola konsisten tertentu.
5. **Daya Tembus (Pervasiveness)**
Sebuah strategi mencakup suatu spectrum luas aktivitas yang berkisar sekitar proses-proses pengalokasian sumber-sumber daya hingga operasi dari hari ke hari. Disamping itu, kebutuhan akan konsistensi dengan berlangsungnya waktu pada aktivitas tersebut mengharuskan bahwa semua tingkat pada suatu organisasi bertindak secara hampir instinktif dengan cara-cara yang memperkuat strategi tersebut.²⁷

Tujuan suatu strategi adalah untuk mempertahankan atau mencapai sesuatu posisi keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing. Organisasi yang bersangkutan masih meraih

²⁷ Winardi, *Strategi Pemasaran (Marketing Strategy)*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hal. 13

suatu keunggulan apabila ia dapat memanfaatkan peluang-peluang di dalam lingkungan, yang memungkinkannya menarik keuntungan-keuntungan dari bidang-bidang kekuatannya.

2.3. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupa mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

Seorang pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005), kesejahteraan sosial adalah Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.²⁸

Pengertian di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai ke arah kehidupan yang lebih baik lagi.

Ilmu kesejahteraan sosial merupakan kelanjutan dan sebuah penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu latar belakang sejarah dan ilmu kesejahteraan sosial pada titik awal masih sama dengan pekerjaan sosial.

²⁸ <http://www.academia.edu/33342904/Apa-itu-Kesejahteraan-Sosial-Apa-itu-Pekerjaan-Sosial-Apa-Peran-Pekerja-Sosial> Diakses tanggal 21 Mei 2018

Adapun definisi pekerjaan sosial menurut *Internasional Federation of Social Workers* (IFSW) (2002) yang dikutip oleh Adi (2005) adalah *The social worker profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with the environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.*²⁹

Profesi pekerjaan sosial mendorong agar terciptanya perubahan sosial, membantu dalam pemecahan masalah pada relasi manusia, serta memberdayakan dan membebaskan manusia untuk mencapai derajat suatu kehidupan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan dengan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi pekerjaan sosial.

Kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, yang pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela.

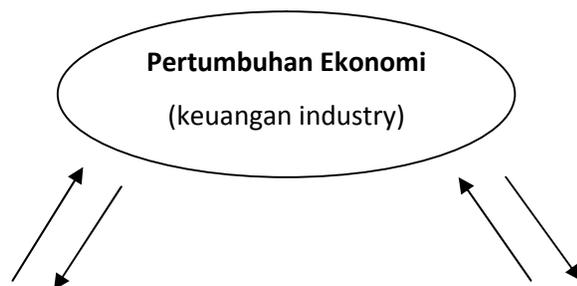
Pembangunan kesejahteraan sosial adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

²⁹ <https://sswdstks.wordpress.com/tag/pekerjaan-sosial/> Diakses tanggal 21 Mei 2018

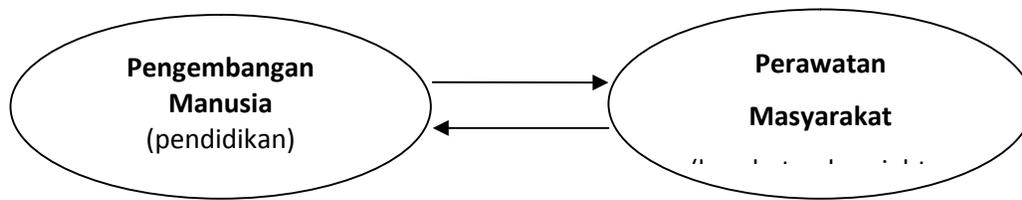
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial bergantung dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM). SDM pembangunan kesejahteraan sosial tersebut meliputi pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial.³⁰

Apabila fungsi pembangunan nasional disederhanakan, maka ia dapat dirumuskan dalam tiga tugas utama yang mesti dilakukan, yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perawatan masyarakat (*community care*), dan pengembangan manusia (*human development*). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan “wirausaha” (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak) guna memperoleh pendapatan financial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga Negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya. Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja yang berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

Gambar 2.2 Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Konteks Pembangunan Nasional.



³⁰<https://m.republika.co.id/berita/duniaislam/hikmah/12/05/28/nasional/umum/16/10//11/oev7tb365-mensos-pembangunan-kesejahteraan-sosial-bergantung-ketersediaan-sdm> Diakses tanggal 20 mei 2018



Sumber : *Indonesian Human Development Report 2004*

2.3.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat memiliki tiga arti sebagai berikut:

1. Dalam umum sejahtera menunjuk keadaan yang baik kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan makmur, sehat dan damai.
2. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
3. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara sejahtera.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait erat dengan kesejahteraan ekonomi rakyat. Defenisi tersebut merupakan defenisi kesejahteraan sosial sebagai sebuah keadaan, yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu agar menciptakan kepedulian antar masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara adil, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari hak azasi, dan memberikan perlindungan merupakan hakikat dari pembangunan rakyat.

Ada tiga inti nilai-nilai yang terkandung dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat yaitu :

1. Swa-sembada, dalam artian kemampuan masyarakat dalam memenuhi atau mencukupi; sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan.
2. Harga diri, kepercayaan diri untuk tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka atau hidup dalam penindasan.
3. Kebebasan, kemampuan untuk memilih alternatif-alternatif bagi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakatnya.

2.3.2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2. Perbaikan Usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4. Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaiki Masyarakat (*better community*) Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2.4. Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³¹

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.

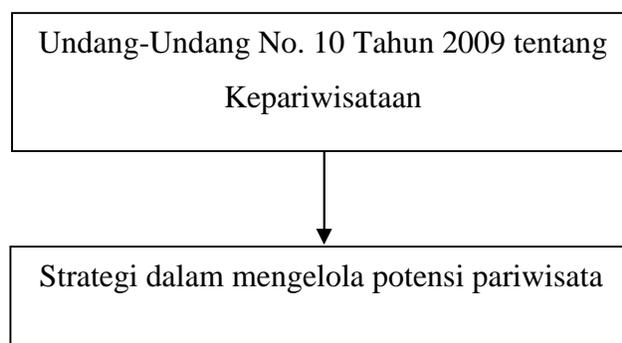
Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Untuk penelitian kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh penulis.

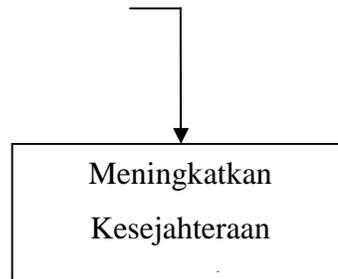
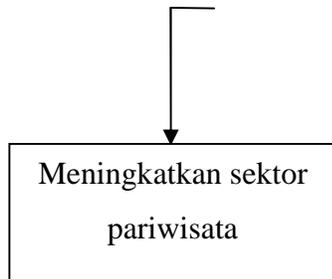
³¹ Sugiyono, *Op.Cit*, hal. 60

Dalam penelitian ini membahas mengenai peraturan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya, khususnya di Kabupaten Nias Barat dalam mengelola potensi pariwisata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berfikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain:

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir





BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai

suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. “strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian”.³²

3.1 Bentuk Penelitian

Metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Creswell menyatakan “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.³³ Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

“Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis yang penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara”.³⁴ Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan

³² Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal.17

³³ Ibid, hal. 4

³⁴ Sugiyono, *Op.Cit*, hal.292

berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

3.2 Lokasi penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat.

3.3 Informan Penelitian

“Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis”.³⁵ Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.³⁶ Peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” Pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti”.³⁷ Oleh sebab itu informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Ibid, hal. 215

³⁶ Ibid, hal. 216

³⁷ Ibid, hal. 219

- a. Informan Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci sebanyak 1 orang yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- b. Informan Utama, dalam penelitian ini penulis menggunakan 1 informan utama yaitu Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
- c. Informan Tambahan, merupakan masyarakat yang ada di Kabupaten Nias Barat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁸ Maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

Prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi, yaitu:

- 1) Observasi Kualitatif, merupakan observasi yang didalamnya penelitian langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.
- 2) Wawancara Kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam atau delapan partisipan.
- 3) Dokumen-Dokumen kualitatif, dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).
- 4) Materi audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.³⁹

³⁸ Ibid, hal 224

³⁹ Jhon W Creswell, **Op.Cit**, hal. 267,270

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.⁴⁰ Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan.⁴¹ Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, proses penggambaran dari daerah penelitian. Dari penelitian ini diperoleh gambaran tentang strategi pemerintah kabupaten nias barat dalam mengelola potensi pariwisata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- 3) Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraf-paragraf).
- 4) Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- 6) Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini ?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.⁴²

⁴⁰ Ibid, hal. 274

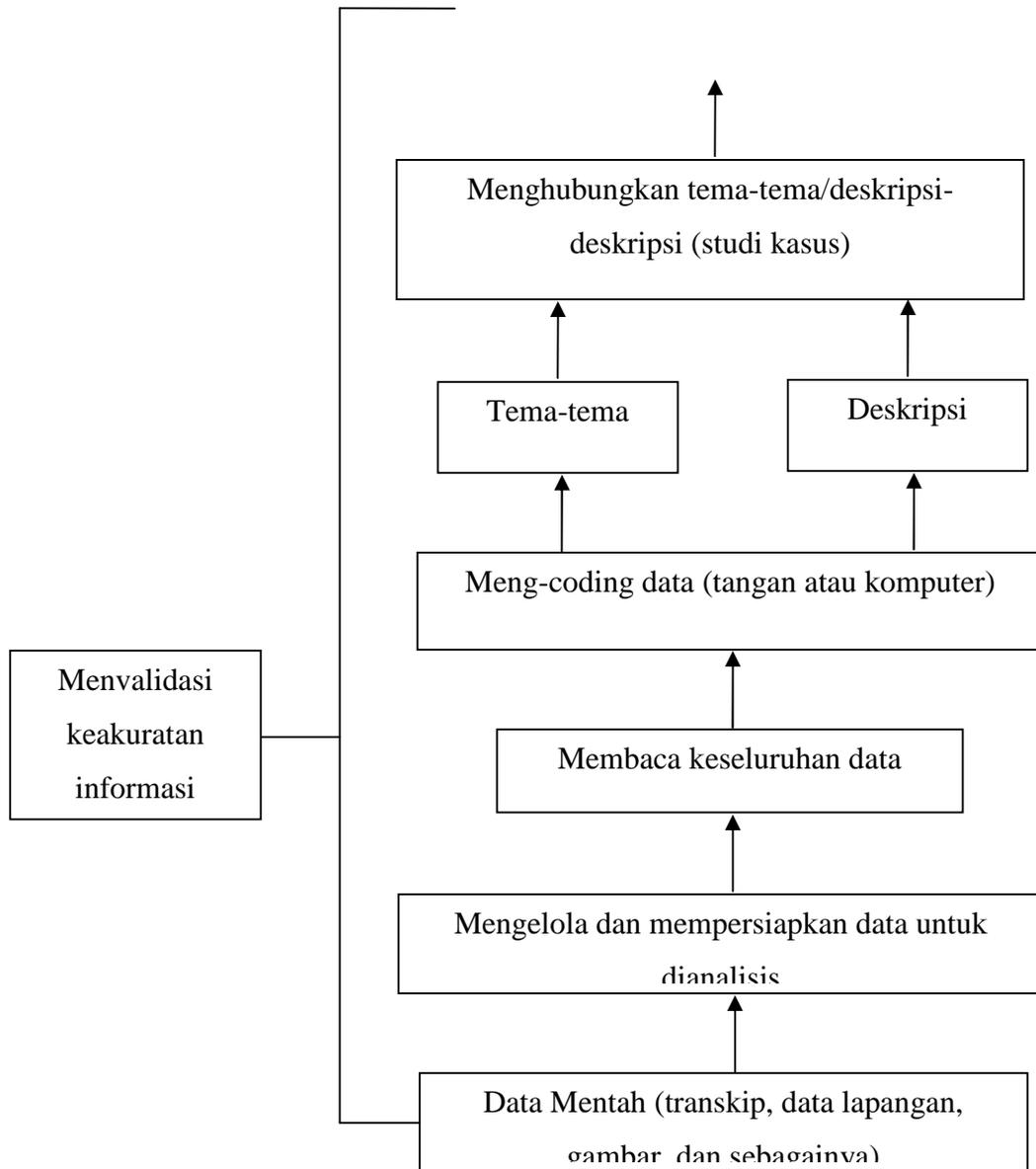
⁴¹ Ibid, hal. 275

⁴² Ibid, hal. 276,282-284

Gambar 3.1

Teknik Analisis Data

Menginterpretasi tema-tema,
deskripsi-deskripsi



Sumber : Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed*,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013,hal.277

3.5.3 Uji Reliabilitas dan Validitas

Dalam penelitian kualitatif, validitas ini tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak juga sejajar dengan reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respon) ataupun dengan generalisabilitas (yang berarti validitas eksternal atas hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang, atau sampel yang baru) dalam penelitian kualitatif.

a) Uji Reliabilitas Data

Yin menegaskan bahwa para peneliti kualitatif harus mendokumentasikan prosedur-prosedur studi kasus mereka dan mendokumentasikan sebanyak mungkin langkah-langkah dalam prosedur tersebut. Dia juga merekomendasikan agar para peneliti kualitatif merancang secara cermat protokol dan database studi kasusnya.

Gibbs dalam Creswell merinci sejumlah prosedur reliabilitas data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut :

- 1) Ceklah hasil transkripsi untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkripsi.
- 2) Pastikan tidak ada defenisi dan makna yang mengambang mengenai kode-kode selama proses *coding*. Hal ini dapat dilakukan dengan terus membandingkan data dengan kode-kode atau dengan menulis catatan tentang kode-kode dan defenisi-defenisinya.
- 3) Untuk penelitian terbentuk tim, diskusikanlah kode-kode bersama-sama partner satu tim dalam pertemuan-pertemuan rutin atau *sharing* analisis.
- 4) Lakukan *cross-check* dan bandingkan kode-kode yang dibuat oleh peneliti lain dengan kode-kode yang telah anda buat sendiri.⁴³

b) Uji Validitas Data

⁴³ Ibid, hal. 284-285

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu.⁴⁴

Berikut ini adalah delapan strategi validitas yang disusun mulai dari yang paling sering dan mudah digunakan hingga yang jarang dan sulit diterapkan :

- 1) Mentrigrulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dengan menggunakannya untuk membangun justidifikasi tema-tema secara koheren.
- 2) Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat.
- 3) Membuat deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan *setting* penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
- 4) Mengklasifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi dari terhadap kemungkinan munculnya bias dari penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca.
- 5) Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “negatif” (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tersebut.
- 6) Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged time*) di lapangan atau lokasi penelitian.
- 7) Melakukan Tanya jawab dengan sesama rekan peneliti (*peer debriefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
- 8) Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk meriview keseluruhan proyek penelitian.⁴⁵

⁴⁴ Ibid, hal. 285

⁴⁵ Ibid, hal. 286-288